

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Strategis Kecamatan Kesamben merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan, yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kesamben bersama rencana strategis OPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar. Rencana Strategis Kecamatan Kesamben mengandung tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Kesamben.

Latar Belakang Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dilakukan secara simultan bersamaan waktunya dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016-2021.

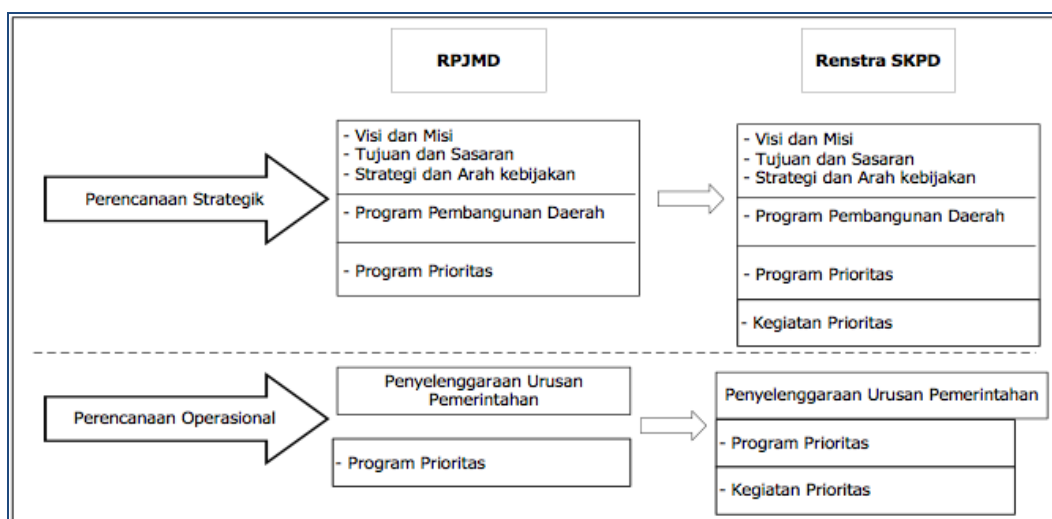
Rencana Strategis memuat Visi pencapaian pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dirumuskan strategi pencapaian yang tepat. Sesuai dengan karakteristik kelembagaan OPD Kecamatan yang berbasis Pemerintahan kewilayahan, maka strategi pencapaian Renstra Kecamatan dirumuskan melalui penguatan fungsi dan kewenangan Kecamatan yaitu :

a. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blitar.

b. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan strategi mendekatkan institusi pelayan kepada masyarakat.

Rencana Strategis perubahan (Renstra) ini disusun sebagai bentuk penerjemahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016-2021. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar 2016 - 2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :

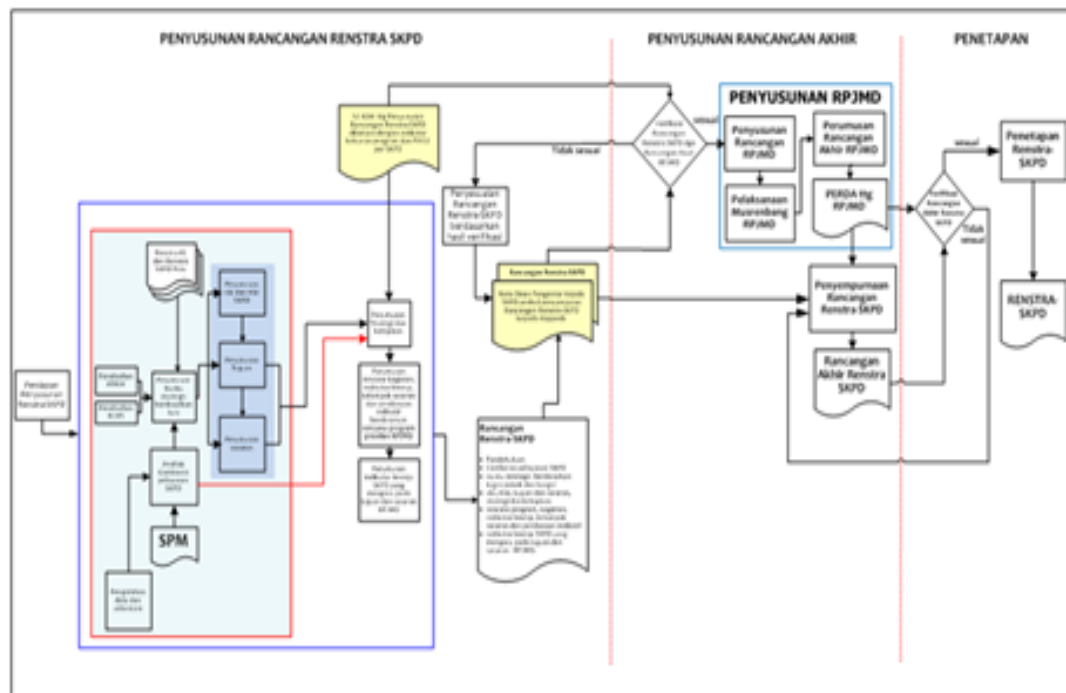
Gambar 1.1
Hubungan Renstra OPD dengan RPJMD



Renstra Perubahan disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah

yang berisi program - program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Gambar 1.2.
Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra OPD



1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra OPD adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 6 Tahun 2011 ;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011 – 2031
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021;
- k. Peraturan Bupati Blitar Nomor 74 tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan.
- l. Surat Edaran Bupati Nomor : 050/255/409.201.3/2017 Tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Organinsasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) Tahun 2016 – 2021.
- m. Surat Keputusan Camat Kesamben No 17 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kesamben Tahun 2016-2021.
- n. Surat Edaran Bupati Nomor : 050/969/409.201.3/2018 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Pemerintah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kesamben Perubahan Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kecamatan KESAMBEN, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Desa di lingkungan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Blitar, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Mempermudah evaluasi kinerja OPD dalam upaya meningkatkan kinerja OPD yang telah di targetkan.
5. Meningkatkan kinerja OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN (SESUAI SE)

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra OPD kabupaten, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor - faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini merupakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun RENstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar

Pada bagian ini dikemukakan pemilihan isu strategis berdasarkan analisis SWOT dan Ballance Score Card atas permasalahan dan kajian dan telaah atas dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD .

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif .

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KESAMBEN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KESAMBEN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa Kabupaten Blitar, ditetapkan **tugas** kecamatan adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan **fungsi** kecamatan adalah :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar terdiri dari atas :

Camat; bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Tugas : - Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat

- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Sarana pelayanan umum;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan ; dan;
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang adadi kecamatan.
- Fungsi
- Menyusun kebijakan teknis operasional pemerintahan
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - Menyelenggarakan pembinaan Wilayah;
 - Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan;
 - Melaksanakan pelayanan publik;
 - Menyusun laporan Kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sekretaris Kecamatan; bertanggungjawab kepada Camat.

- Tugas : Pengelolaan administrasi secara umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumas dan keputakaan serta arsip
- Fungsi : - Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja;

- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Mengkoordinasikan Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- Mempimpin pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- Mengkoordinasikan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- Memverifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh desa;
- Mengkoordinasikan asset/kekayaan daerah yang ada di kecamatan kantor;
- Memimpin pelayanan administrasi dan pembinaan pegawai;
- Memverifikasi pengelolaan dan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- Memverifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan restribusi;
- Memverifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji
- Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumahtangga dan perlengkapan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Standar pelayanan Publik;
- Memfasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan memperbaiki kualitas layanan;
- Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Mengevaluasi laporan hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui Website Pemerintah Daerah;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 2 orang Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas : Penyusunan program, Evaluasi, pelaporan dan Keuangan.

- Fungsi :
- Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
 - Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - Menyusun Penetapan Kinerja (PK);
 - Menyusun laporan dan dukumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - Menyusun dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - Menyusun pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan memperbaiki kualitas layanan;
 - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - Merencanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - Menyusun penatausahaan keuangan;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
 - Menyusun Administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
 - Menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyeteroran restribusi dan/atau lain- lain pendapatan yang sah;
 - Menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui Website pemerintah Daerah;

- Menyusun laporan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsiapan.

Fungsi : - Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

- Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Melaksanakan kehumasan,keprotokolan dan kepustakaan;
- Melaksanakan pengaduan masyarakat;
- Melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Camat dibantu oleh beberapa Seksi yaitu :

a. Seksi Pemerintahan

Tugas : - Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Fungsi : - Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- Mengkoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional,persatuan dan kesatuan bangsa;
- Mengkoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- Memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan/atau Desa;

- Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi bidang keagrariaan dan pendataan penduduk;
- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- Melaksanakan Standar pelayanan Minimal (SPM)di Bidang Pemerintahan;
- Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- Memfasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
- Mefasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permasyarakatan desa dan forum musyawarah kelurahan atau sebutan lainnya;
- Memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- Memfasilitasi kerjasama antar kelurahan dan/atau desa dan kerjasama kelurahan dan/atau desa dengan pihak ketiga;
- Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayaan ruang desa serta penetapan dan penegakan batas kelurahan/atau desa;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

b. Seksi Pelayanan publik

- Tugas : - Penyelenggaraan sebagian urusan bidang pelayanan publik;
- Fungsi : - Menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan;

- Menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat masyarakat yang menjadi ruang lingkup di kecamatan;
- Menyusun pelayanan standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada di masyarakat di kecamatan;
- Mengkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- Mengkoordinir dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- Memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat surat yang di butuhkan masyarakat;
- Melaksanakan standar pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan publik;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas : - Penyelenggara sebagian urusan bidang pemberdayaan masyarakat

Fungsi : - Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangkaperencanaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan;

- Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan/atau desa dan kecamatan;
- Memfasilitasi pengkoordinasikan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program

kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- Monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan/atau desa;
- Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- Memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya;
- Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertanian kepariwisataan, perkoperasian, dan usaha kecil Men (UKM);
- Memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- Merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di wilayah kerjanya;
- Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
- Memfasilitasi kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang pemberdayaan masyarakat;
- Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

d. Seksi Ketentraman dan ketertiban

- Tugas : - Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- Memfasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - Memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang perundangan;
 - Melaksanakan koordinasi dengan kepolisian Negara republic Indonesiadan/atau Tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan umum di wilayah kecamatan;
 - Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
 - Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
 - Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Melaksnakan pembinaan ketentraman dan ketertiban kecamatan dan kelurahan/atau desa;
 - Menjaga pembinaan perlindungan Masyarakat;
 - Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta pengungsi;
 - Melaksanakan Standar Pelayan Minimal di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada camat.

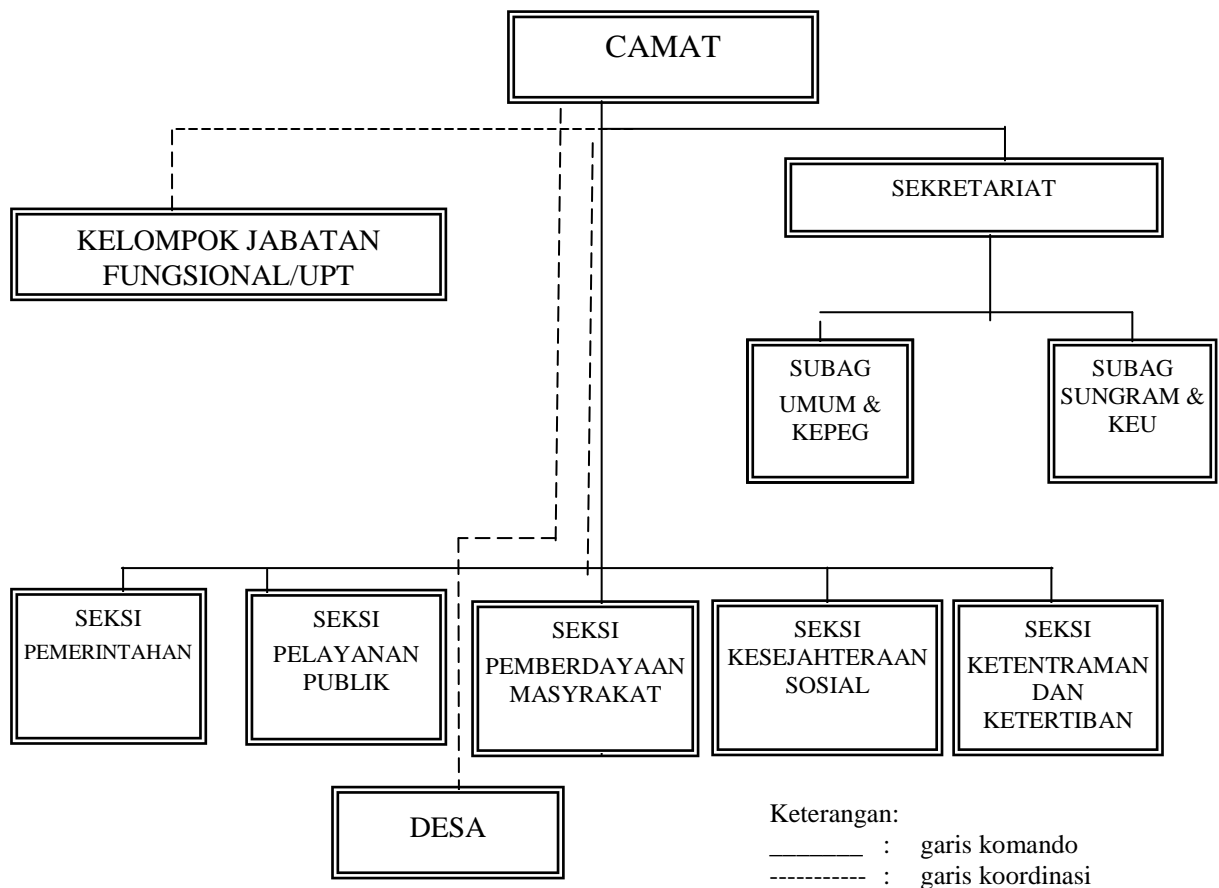
e. Seksi Kesejahteraan Sosial

- Tugas : - Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang bertugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat;
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - Menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
 - Melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
 - Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
 - Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - Melaksanakan pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
 - Memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
 - Melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;
 - Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesejahteraan Masyarakat;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Di dalam tata kerja Kecamatan KESAMBEN disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja menerapkan prinsip koordinasi dengan selalu melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya dan bertanggungjawab memimpin serta mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kecamatan KESAMBEN bisa dilihat dari Bagan Struktur Organisasi Kecamatan KESAMBEN dibawah ini :

Gambar 2.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KESAMBEN



2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN KESAMBEN

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kesamben pada tahun 2016 didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya OPD yang dimiliki. Sumber daya manusia yang ada di Kantor Camat Kesamben terdiri dari 19 orang dengan spesifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
1.	Camat	S-2 Managemen	1
2.	Sekretaris Kecamatan	S-2 Managemen	1
3.	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	S1 Psikologi	1
4.	Kasubag Kepegawaian dan Umum	S1 Ekonomi	1
5.	Kasi Pemerintahan	D-III	1
6.	Kasi Pembangunan	S-1 Sosial	1
7.	Kasi Sosial	S-1 Sosial	1
8.	Kasi Trantib	S-1 Sosial	1
9.	Kasi Pelayan Publik	SLTA	1
10.	Staf	S-1	3
11.	Staf	SLTA	2
12.	Sekretaris Desa	SLTA	5
13.	Karyawan Kecamatan	SLTA	1
Jumlah Total			20

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kesamben dirasakan masih kurang. Hal tersebut bisa dilihat dari masing-masing Kepala Seksi belum semuanya mendapat fasilitas prasarana kerja seperti laptop/komputer dan printer sehingga satu komputer dan printer digunakan secara bersama-sama secara bergiliran, hal ini menjadikan pegawai kecamatan kurang fokus, kurang bersemangat dalam bekerja baik pekerjaan sesuai tupoksi ataupun tugas yang lainnya. Dalam mendukung kinerja OPD, sumber daya OPD yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja adalah aset tetap yang perolehannya berasal dari hasil pengadaan/pembelian serta berasal dari hibah. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Kesamben dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1
Kondisi Sarana Prasarana Kerja Kecamatan Kesamben

No.	MACAM ASET TETAP	KONDISI	NILAI (Rp.)	JUMLAH BARANG (buah/unit)
1.	Tanah Bangunan	Baik	398.780.000	1
2.	Peralatan dan Mesin	Baik	762.832.395	110
3.	Bangunan	Baik	109.931.625	1
4.	Aset tetap lainnya		0	0
5.	Aset lainnya	Rusak	0	0
JUMLAH			1.271.544.020	467

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Kantor Kecamatan Kesamben merupakan salah satu OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Blitar yang melaksanakan urusan wajib. Dalam urusan wajib ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Adapun pencapaian kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam tabel 2.3 dan 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar

No	Penanggungjawab	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi OPD	Target SPM	Target IKK	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	Target Indikator or lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
								2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	per 31-6-2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Kasubag umum dan kepegawaian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran						100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	98%	99%	50%	0%	-5%	-2%	0%	-148%
									1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	97%	98%	99%	50%	0%	-5%	-2%	0%
2	Kasubag umum dan kepegawaian	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Sarana Prasarana Kantor						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47%	0%	0%	0%	0%	-167%
									1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	100%	100%	100%	47%	0%	0%	0%	0%
3	Kasubag penyusunan program dan keuangan	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu						76%	83%	90%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	57%	0%	0%	0%	0%	-120%
									1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	57%	0%	0%	0%	0%
4	Kasi pemerintahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan						65%	70%	80%	90%	100%	33%	100%	75%	100%	25%	#DIV/0!	33%	#DIV/0!	33%	#DIV/0!
									65%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%

5	Kasi pembangunan					65%	70%					100%			#DIV/0!	100%					
				Terwujudnya Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa/Kelurahan			65%	70%					100%			#DIV/0!	100%				
				Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah					80%	90%	100%			100%	100%	27%			100%	0%	-347%
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan					80%	90%	100%			100%	100%	23%			100%	0%	-417%

6	Kasi kesos			Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Kelurahan					80%	90%	100%				100%	74%		#DIV/0!	100%	-61%	
				Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Hibah Pembangunan Rumah Rumah Tidak Layak Huni						80%						100%				100%	
				Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Aparatur se Kecamatan							80%						100%				100%
7	Kasi Linmas			Terlaksananya Musrenbang Kelurahan						90%										#DIV/0!	

8	Kasi trantib			Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Kelurahan						90%										
				Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan						90%										#DIV/0!
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Kelurahan						90%										#DIV/0!
				Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan						90%										#DIV/0!

				Desa Tentang APBDes a															
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya Administrasi Perkantoran	87.835.500	68.448.000	80.105.000	75.225.000	86.255.000	86.176.000	66.677.000	78.175.000	74.463.950	8.050.000	100%	-29%	15%	-5%	-825%	0%	-38%
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi	6.200.000	65.730.000	106.945.000	115.560.000	80.695.000	6.200.000	65.730.000	106.945.000	115.560.000		100%	91%	39%	7%	#DIV/0!	67%	-100%
3	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan dan capaian kinerja	1.403.100	2.662.500	4.255.000	3.505.000	4.725.175	1.403.100	2.662.500	4.245.000	3.505.000		100%	47%	37%	-21%	#DIV/0!	27%	-100%

4	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kel	5.400.000	7.000.000	9.610.000	15.860.000	4.975.000	5.400.000	13.707.500	9.610.000	15.860.000	4.950.000	100%	61%	-43%	39%	-220%	-2%	-2%
5	Fasilitasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kel	5.500.000	5.500.000				5.500.000	5.500.000				100%	0%				0%	0%
6	Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa/Kelurahan		46.310.000					46.290.000	-			#DIV/0!	100%					#DIV/0!
7	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah			5.500.000	26.250.000	28.500.000			5.500.000	26.250.000	3.000.000			100%	79%	-775%		
8	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa/Kel				23.500.000	32.716.000				23.500.000				#DIV/0!	100%	#DIV/0!		

9	Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Kelurahan			22.500.000	6.515.000	8.000.000			22.500.000	5.615.000				100%	-301%	#DIV/0!		
10	Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Hibah Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni				10.000.000	10.000.000				9.900.000					100%			
11	Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Aparatur se Kecamatan				10.000.000					10.000.000					100%			

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN KINERJA OPD

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben merupakan unit pelayanan umum kepada masyarakat, hal ini dapat dikatakan bahwa tugas utama yang diemban oleh Kantor Kecamatan Kesamben, apalagi di era reformasi dan globalisasi tentunya tidaklah ringan, karena langsung bersinggungan dengan masyarakat yang mempunyai karakter berbeda satu dengan yang lain.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kantor Kecamatan Kesamben adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat;
3. Meningkatkan disiplin kerja Staf Kantor Kecamatan Kesamben;
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan, baik intern Kantor Kecamatan Kesamben, maupun Desa dalam segi pemerintahan dan pembangunan;
5. Meningkatkan peran serta wanita dan generasi muda dalam memacu kegiatan pembangunan;
6. Meningkatkan pembinaan ke Desa upaya pemberdayaan kinerja lembaga yang ada;
7. Meningkatkan pelaksanaan panca tertib pemerintah, meliputi :
 - a. Tertib Program
 - b. Tertib Anggaran
 - c. Tertib Administrasi
 - d. Tertib pelaksanaan
 - e. Tertib pengendalian dan pengawasan
8. Meningkatkan tribudaya , yaitu :
 - a. Budaya kerja
 - b. Budaya bersih
 - c. Budaya disiplin

Melihat perkembangan sekarang dimana sudah memasuki Masyarakat Ekonomi Asia, maka Aparatur Pemerintah Kecamatan Kesamben dituntut mempunyai tingkat sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai skill serta inovatif. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dicermati banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Kesamben

supaya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjaga kualitas serta meningkatkan skill Aparatur. Untuk memberikan pelayanan yang baik perlu adanya tingkat disiplin, komitmen dan konsekuen yang tinggi dalam segala bidang. Apabila hal tersebut bisa berjalan dengan maksimal, maka pelaksanaan Panca tertib Pemerintah dan Tribudaya bisa terwujud. Pada implementasi tugasnya sebagai Aparatur Pemerintah Kecamatan juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan masyarakat sehingga diharapkan bisa menyampaikan informasi dengan tepat dan akurat kepada berbagai elemen masyarakat.

Sebagaimana tertuang pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa tugas pokok Camat beserta staf sangat komprehensif dan multi fungsi. Hal ini mendorong seluruh aparatur untuk bisa memahami dan melaksanakan tugas pokok fungsinya masing - masing. Terintegrasinya kemampuan komunikasi serta penguasaan materi dan Iptek akan memberikan peluang kepada Aparatur Kecamatan Kesamben sebagai narasumber bagi seluruh masyarakat Kecamatan Kesamben. Peluang yang baik ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan, pendekatan dan pemberian informasi kepada masyarakat agar bisa tersampaikan informasi yang terkini, meminimalisir masalah yang mungkin timbul serta menjaga situasi lingkungan supaya tetap kondusif.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Kesamben, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Kesamben dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Kesamben sebagai berikut:

1. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Kesamben yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;
2. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Kesamben yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kesamben.
4. Belum tersedianya data – data sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
5. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan ke OPD

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kesamben dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan kesamben, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;

2. Masih adanya ego sektoral masing-masing OPD tentang program dan kegiatan;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan baru yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang bersangkutan;
5. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
6. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Kesamben sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Desa terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
2. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kesamben sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Kesamben, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan yang besar kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama antara kecamatan dengan Desa;
2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana.

Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang disebutkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan ***bahwa isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2016 - 2021***, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kabupaten blitar terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen strandar pelayanan minimal *public services and*

public complaint. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kesamben dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM,

PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *stakeholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

System manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas public (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislative.

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan;
- (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) pengamanan barang daerah;
- (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mana visinya adalah ***“Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”***, sedangkan misinya adalah :

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial serta penerapan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadahi;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, ekonomi kreatif serta potensi lokal daerah;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan tugas pokok Kecamatan Kesamben yaitu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sehingga misi kepala daerah terpilih yang sesuai dan berhubungan dengan kecamatan Kesamben yaitu Misi ke-4 tentang meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan strategi dan arah kebijakan Misi ke-4 antar lain :

1. **Strategi kesatu**, melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel;
Arah kebijakan : peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan
2. **Strategi Kedua**, mengoptimalkan perencanaan sistem pengawasan internal
Arah Kebijakan : peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal pemerintah
3. **Strategi Ketiga**, meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
Arah Kebijakan : peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. **Strategi Keempat**, menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien;
Arah Kebijakan : penataan struktur kelembagaan daerah sesuai kebutuhan daerah
5. **Strategi Kelima**, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
Arah Kebijakan : menerapkan pembinaan kinerja aparatur
6. **Strategi Keenam**, menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan efisien;
Arah Kebijakan : peningkatan standart kualitas pelayanan OPD

Dan Misi ke- 6 tentang Meningkatkan Pembangunan berbasis Desa dan Kawasan Pedesaan dengan strategi dan arah kebijakan Misi ke-6 antar lain :

1. **Strategi kesatu**, Memperkuat Kelembagaan Pemerintah Desa;

Arah kebijakan : 1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa

2. **Strategi Kedua,** Mengembangkan Kawasan Perdesan

Arah Kebijakan : Pemetakan, Pembentukan dan Pengembangan kawasan Pedesaan berbasis Potensi Lokal

3. **Strategi Ketiga,** meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa;

Arah Kebijakan : peningkatan Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Apabila kita pahami dengan seksama dari visi Kepala Daerah terpilih, maka kita dapat menarik suatu garis besar bahwa dari visi dikaitkan dengan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Kesamben yang merupakan kepanjangan tangan Kepala Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih tersebut, dengan :

Tabel 3.2 Telaah Visi,Misi dan RPJMD

NO	Visi	Misi	Tupoksi Camat
1.	Menuju Kabupaten Blitar lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing	IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Menyusun Kebijakan Tehnis Operasional Kecamatan 2. Melaksanakan Pelayanan Publik 3. Menyusun Laporan Kinerja secara Periodik kepada Bupati 4. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Pearturan perundang – undangan
2.	Menuju	VI: Meningkatkan	1. Menyelenggarakan

	Kabupaten Blitar lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing	Pembangunan berbasis Desa dan Kawasan Pedesaan	Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan 2. Menyelenggarakan Pembinaan Kewilayahan 3. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
--	--	--	--

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 - 2013 adalah *” Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.*

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 - 2013 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat - daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;

- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kecamatan Kesamben terletak di Wilayah Kabupaten Blitar yang tepatnya berada di sebelah barat ibu kota Kabupaten Blitar , dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kecamatan Doko

Sebelah selatan: Kecamatan Binangun

Sebelah timur : Kecamatan Selorejo

Sebelah barat : Kabupaten Selopuro

Kecamatan KESAMBEN terdiri dari 10 Desa meliputi :

- Desa Kesamben
- Desa Jugo
- Desa Siraman
- Desa Pagergunung
- Desa Pagerwojo
- Desa Tepas
- Desa Kemirigede
- Desa bumirejo
- Desa Tapakrejo
- Desa Sukoanyar

Kecamatan Kesamben merupakan daerah agraris, dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian. Sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada hasil pertanian.

A. Analisis Lingkungan Internal

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, masalah yang timbul adalah berubahnya alih fungsi lahan yang dulu lahan pertanian untuk tanaman pangan begitu luas, sekarang menjadi sempit dengan

penggunaan lahan pertanian untuk bangunan rumah atau pergudangan. Dengan bertambahnya jumlah manusia dan adanya kebijakan yang mengatur tentang tata ruang yang tidak efektif dan efisien akhirnya lahan pertanian menjadi tidak produktif lagi.

Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan internal yaitu ;

1. Faktor Pendorong

Pada faktor kekuatan ini ada 4 hal yang sangat berpengaruh penting yang menjadikan kekuatan bisa dimanfaatkan secara maksimal, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Di Indonesia banyak sekali tersedia sumber daya manusia yang secara langsung bisa dimanfaatkan. Pada tingkat sekolah lanjutan atas banyak anak yang lulus SPMA atau SMK jurusan pertanian yang sudah diluluskan. Di tingkat perguruan tinggi ada ratusan sarjana yang sudah diluluskan. Selain dari pendidikan formal juga ada generasi muda yang mendalami bidang pertanian, baik dari hasil pelatihan dan dari hasil belajar secara otodidak dari orang tua yang pekerjaan mereka sebagai petani dan ikut kerja di perkebunan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia yang merupakan Negara agraris mempunyai kekuatan sumber daya manusia yang besar dalam mendukung pembangunan pertanian.

b. Sarana/prasarana

Dengan semakin banyaknya lulusan dan sarjana pertanian merupakan modal tersedianya tenaga kerja yang handal dan bisa dberdayakan secara optimal. Dan dengan berkembangnya daya kreatifitas dari sarjana ini dapat memunculkan berbagai inovasi teknologi yang berdaya saing tinggi. hal tersebut membuat pembangunan bidang pertanian bisa berjalan dengan baik.

c. Keuangan

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, yang apabila dimanfaatkan secara optimal, dapat dimanfaatkan sebagai modal utama dalam pembangunan bidang pertanian. Dengan memanfaatkan hasil dari bercocok

tanam, berkebun, berternak hewan dan ikan, bisa diputar kembali sebagai modal dan mencukupi kebutuhan hidup rakyat Indonesia. Selain itu juga dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di pedesaan maka investasi tidak berhenti di kota saja, sehingga desa akan mendapat investasi dari perkembangan ekonomi yang baik, pendapatan warga desa akan meningkat karena tersedianya lapangan pekerjaan yang luas.

d. Teknologi

Dengan tersedianya Sumber daya manusia yang mumpuni dan didukung sarana/prasarana serta keuangan yang baik, maka akan memunculkan teknologi yang baru yang dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Kemunculan teknologi tepat guna yang dirancang dan dibuat, bisa menghasilkan produk yang baik dan aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat dan bahkan bisa dinikmati sebagai produk ekspor unggulan bangsa Indonesia. Sehingga *in come* masyarakat dan devisa Negara meningkat.

2. Faktor Penghambat

Pada faktor kelemahan ini juga ada 4 hal yang berpengaruh penting sebagai pendukungnya, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Dengan perubahan pola pikir dan persepsi yang berbeda dan bermacam-macam, maka banyak sarjana dan lulusan yang berpandangan bahwa pertanian merupakan sektor pekerjaan kuno yang pantas untuk ditekuni oleh orang tua dan orang desa saja. Juga kurangnya jiwa kewirausahaan sehingga lebih memilih menjadi karyawan ketimbang menciptakan peluang usaha. Selain itu banyak lulusan dan sarjana yang pergi ke kota atau luar negeri menjadi TKI dengan tujuan mencari uang banyak. Sehingga faktor tersebut menjadi kelemahan dalam pembangunan ketahanan pangan.

b. Sarana/prasarana

Kurangnya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk sarana yang menunjang pembangunan ketahanan pangan menjadi sebab kelemahan juga. Selain itu adanya alih fungsi

lahan sebagai penyebab kurangnya sarana/prasarana pertanian untuk pengembangan tanaman pangan.

c. Keuangan

Kurangnya permodalan yang digunakan untuk pertanian dan pengembangan tanaman pangan juga berpengaruh kepada semangat petani untuk mengembangkan lahan disekitar mereka. Selain itu, adanya perubahan iklim yang tidak menentu yang tidak disertai dengan teknologi yang mendukung untuk mengatasi perubahan iklim ini karena dana yang terbatas, maka banyak petani yang menyerah pada keadaan.

d. Teknologi

Keterbatasan teknologi tepat guna dan masih banyaknya petani yang menggunakan peralatan tradisional, sehingga penerapan sistem pertanian yang cepat, modern dan pengolahan hasil pertanian yang higienis tidak terwujud. Penerapan sistem pertanian dan pengolahan hasil pertanian yang ada sekarang masih apa adanya dan tergantung pada kondisi alam sehingga produk yang dihasilkan menjadi kurang optimal.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan dan disahkan telah berpengaruh besar pada pembangunan dan pengembangan sektor ketahanan pangan. Hal ini tampak dari kebijakan – kebijakan yang ada baik di tingkat pusat kurang didukung dengan kebijakan yang ada di daerah karena situasi dan kondisi yang berpengaruh besar didaerah tersebut. Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu :

1. Faktor Pendorong

Pada analisis lingkungan eksternal faktor peluang ini ada 4 hal yang sangat mempengaruhi, yaitu :

a. Politik

Di negara demokrasi seperti Indonesia, bidang politik sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Namun bila kebijakan politik yang dikeluarkan itu dibuat berdasarkan pada situasi dan kondisi wilayah negara kesatuan republik indonesia serta bertujuan untuk kesejahteraan rakyat

Indonesia, maka pembangunan pertanian dapat berjalan dengan lancar., sehingga diharapkan pembangunan pertanian merupakan prioritas pembangunan yang utama. Hasil pembangunan pertanian tidak dapat dilihat secara langsung untuk waktu sekarang, namun dapat dirasakan untuk waktu yang panjang dan berguna untuk kelangsungan hidup umat manusia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu, diharapkan para elit politik mempunyai gagasan atau program yang bisa mendukung dan mengarah untuk pembangunan pertanian..

b. Ekonomi

Bidang pertanian merupakan salah satu pendukung keberhasilan pembangunan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dengan mendatangkan devisa bagi negara. Bila peningkatan pembangunan ekonomi tidak dititik beratkan pada salah satu bidang, namun juga meningkatkan pembangunan pada semua bidang.

c. Persaingan

Dalam usaha pasti ada persaingan, apalagi produk yang diproduksi sama. Namun jika kita bisa mengelola dengan baik, maka kita dapat mengatasi dengan inisiatif dan kreatifitas kita sendiri. Begitu juga dengan pembangunan bidang pertanian . Bila semua masyarakat Indonesia mempunyai daya kreatifitas yang tinggi, maka penganeekaragaman bahan pangan akan bervariasi sesuai daya kreatifitas masyarakat dengan berbasis bahan baku lokal. Sehingga ketergantungan bahan pangan tidak terpancang pada beras saja. Hal ini dapat mengurangi pemerintah untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand. Karena ketersediaan dan keanekaragaman bahan pangan bangsa Indonesia yang cukup besar. Dengan ketercukupinya stok bahan pangan di Indonesia maka kita bisa mengeksport bahan pangan non beras sehingga membuat daya saing yang luas.

d. Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan sangat terbuka luas memberi kesempatan pada petani dan penyedia

bahan pangan untuk menyerap teknologi baru dengan mengembangkan produksinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Dengan kemajuan teknologi ini petani Indonesia mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan tentang cara berbudidaya yang baik dan dapat mengembangkan potensi-potensi sumber daya lokal untuk dikembangkan dan diolah menjadi produk yang di gemari oleh masyarakat Indonesia serta dapat dinikmati oleh masyarakat luar negeri.

2. Faktor Penghambat

Pada analisis lingkungan eksternal faktor penghambat atau ancaman yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi antara lain :

a. Politik

Kebijakan politik dari elit politik sangat berperan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang akan ataupun telah dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. Hal ini dapat memengaruhi hasil yang telah dicapai, apabila kebijakan politik itu baik dan mengarah untuk kesejahteraan masyarakat luas, maka kemakmuran masyarakat akan terlihat baik. Apabila kebijakan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan, maka kesengsaraan masyarakat akan tampak, bahkan masalah baru bisa muncul dari kebijakan tersebut. Dengan adanya pengaruh dari segelintir orang yang hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka kita harus mengimpor bahan pangan dari luar negeri.

b. Ekonomi

Krisis ekonomi yang telah melanda dunia pada tahun 1997 lalu telah mengoyak perekonomian Indonesia yang mana keadaan politik juga sempat goyah dengan munculnya gerakan reformasi. Dimana pembangunan bidang pertanian juga ikut goyah dengan perubahan iklim yang sangat drastis, dimana dengan perubahan iklim tersebut terjadi kegagalan panen yang menyebabkan Indonesia mulai mengimpor bahan pangan,

bukan hanya beras saja namun juga ubi-ubian harus diimpor dari luar negeri.

c. Persaingan

Dengan berlakunya pasar bebas Asia yang dimulai pada tahun 2010 tersebut, dapat kita rasakan pengaruhnya pada tahun sekarang ini. Dimana produk-produk dari luar negeri terutama cina membanjiri pasar dalam negeri. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia tidak siap untuk menghadapi program yang telah disepakati oleh anggota APEC. Produk dari cina yang harganya masih diatas harga local dan jumlah yang besar telah menisihkan produk lokal tersebut. Bangsa Indonesia malah terlena dengan perkembangan politik dalam negeri pasca reformasi ketimbang mempersiapkan kemajuan ekonomi untuk menghadapi pasar bebas. Sehingga disinilah ancaman yang menerpa bangsa Indonesia sehingga kita kalah bersaing.

d. Teknologi

Kemajuan teknologi kadang ditanggapi latah oleh penduduk Indonesia, dimana mereka kadang tidak mau menyaring perkembangan teknologi yang ada dengan benar, yang seharusnya dijadikan sebagai sumber informasi atau inovasi malah tidak ditanggapi dengan serius, malah perkembangan teknologi yang tidak dapat dijadikan tuntunan malah didahulukan. Sehingga pemerintah sebagai regulator harus bisa mengatur dengan benar.

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau rencana pembangunan jangka menengah daerah pasti tidak bisa terlepas dari rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian karena dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang kita harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dengan tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sedangkan bila kita telaah lebih dalam, kajian lingkungan hidup strategis juga sangat berperan penting, hal ini agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tidak mengganggu lingkungan. Apabila kedua hal tersebut dikaitkan dengan pembangunan di Kantor Kecamatan Kesamben, sangat

erat sekali. Pembangunan sangat didukung oleh rencana tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis. Karena pembangunan di Kecamatan Kesamben pelaksanaannya didukung dan dilaksanakan oleh beberapa *stakeholder*, maka pembangunan yang terpadu harus benar-benar didukung dan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Blitar.

8 Isu strategis Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021 sebagai berikut:

1. Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi;
2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban keamanan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Pengembangan potensi pariwisata
7. Kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah
8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Pemerintah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar meliputi :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis Kabupaten Blitar berhubungan dengan isu-isu Kecamatan Kesamben terutama pada point 4 Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan point 5 pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sedangkan isu-isu yang lainnya memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Blitar yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada

Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD KECAMATAN KESAMBEN

Perumusan Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Kesamben harus mengacu kepada Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar sebagai berikut :

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

VISI: "MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING"										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi I: Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat										
1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	1. Pertumbuhan ekonomi (%)	1. Menurunnya angka kemiskinan	a. Angka Kemiskinan (%)	10,22	10-10,22	9,9-10	9,8-9,9	9,7-9,8	9,6-9,7	≤ 9,6
			b. Pendapatan per kapita (juta rupiah)	23,39*	25,97	28,24	30,8	33,72	37,31	40,35
			c. Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,79	2,78	2,77	2,75	2,73	2,71	2,70
	2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
Misi II: Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum										
2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	3. Terwujudnya stabilitas wilayah	a. Persentase penanganan konflik (%)	100	100	100	100	100	100	100
			b. Persentase penegakan PERDA (%)	95	95	95	95	100	100	100
Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)										
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,57	0,57	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60



VISI: "MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING"										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		9. Meningkatnya pelayanan perijinan	Predikat IKM Layanan Perijinan	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		10. Efektivitas pemanfaatan ruang dan lingkungan	a. Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	75	77	79	80	82	84	85
			b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,31	66,7	67	68	69	70	71
Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Pedesaan										
6. Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	11. Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa tertinggal (%)	22,7	20,45	16,36	11,81	7,27	3,64	0

Catatan: *) data sementara bersumber dari BPS Kabupaten Blitar

Tujuan adalah antitesis dari rumusan isu-isu strategis yang dihasilkan dari telaah berbagai sumber yang telah dilakukan sebelumnya. Perumusan Tujuan harus ekuivalen dengan Isu strategis, tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar maka Kecamatan Srengat mendukung seluruh misi-misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar khusus Kecamatan Kesamben salah satunya pernyataan misi yaitu misi ke-4 (empat) Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan dan misi ke-6 (enam) yaitu Meningkatkan Pembangunan berbasis Desa dan Kawasan Pedesaan untuk mewujudkan misi ke-4 (empat) dan misi ke-6 (enam) tersebut dapat dicapai melalui beberapa tujuan yaitu :

- 1). Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional; dan
- 2). Meningkatkan Kemandirian Desa

Sementara sasaran merupakan ukuran yang bisa menunjukkan pencapaian Tujuan Pembangunan. Di dalam sasaran melekat Indikator Sasaran, untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran :

1.) Sasaran dari tujuan yang pertama yaitu Mewujudkan Pelayanan kepada Masyarakat yang Profesional dengan sasarannya adalah Meningkatnya Pelayanan Kecamatan dengan indikator sasarannya Indeks Kepuasan Masyarakat;

2.) Sasaran dari tujuan yang kedua yaitu Meningkatkan Kemandirian Desa dengan sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa/Kelurahan dengan indikator Sasarannya Prosentase Peningkatan Desa dengan Administrasi berkualitas baik.

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kesamben sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kesamben secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar beserta kinerjanya disajikan dalam tabel dibawah ini :

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar beserta kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.1 (terlampir).

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD KECAMATAN KESAMBEN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Kesamben. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi ke-4 tentang meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu langkah strategis dan rencana organisasi sebagai berikut sesuai dengan table 5.1.1 (terlampir).

Langkah Strategis yang dijalankan :

1. **Strategi kesatu**, melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel;
Arah kebijakan : peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan
2. **Strategi kedua**, meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
Arah Kebijakan : peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. **Strategi ketiga**, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
Arah Kebijakan : menerapkan pembinaan kinerja aparatur
4. **Strategi keempat**, menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan efisien;
Arah Kebijakan : peningkatan standart kualitas pelayanan OPD

Langkah rencana organisasi yang perlu dilakukan :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur Kecamatan Kesamben dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sesuai dengan jabatan masing-masing untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Dan Misi ke- 6 tentang Meningkatkan Pembangunan berbasis Desa dan Kawasan Pedesaan dengan strategi dan arah kebijakan Misi ke-6 antar lain :

1. **Strategi kesatu**, Memperkuat Kelembagaan Pemerintah Desa;

Arah kebijakan :1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur pemerintah

2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa

2. **Strategi Kedua**, Mengembangkan Kawasan Perdesaan

Arah Kebijakan : Pemetakan, Pembentukan dan Pengembangan kawasan Pedesaan berbasis Potensi Lokal

3. **Strategi Ketiga**, meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa;

Arah Kebijakan : peningkatan Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Langkah rencana organisasi yang perlu dilakukan :

1. Menurunkan angka kemiskinan dengan membuka wirausaha baru;
2. Mengembangkan pariwisata dan desa wisata ;
3. Mengembangkan dan mengolah produk pertanian ;
4. Mengembangkan daya saing UMKM ;
5. Mengembangkan kawasan perdesaan desa tertinggal.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini merupakan Rencana Kinerja Kecamatan Kesamben selama 5 tahun ke depan yang memuat informasi tentang tujuan, sasaran yang ingin dicapai, Indikator Sasaran (Impact), Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016), Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 5 tahun ke depan tahun 2017-2021, Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD (2021), Unit Kerja OPD Penanggung-jawab dan lokasi.

Adapun komponen tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan

Adalah antitesis dari rumusan isu-isu strategis yang dihasilkan dari telaah berbagai sumber yang telah dilakukan sebelumnya. Perumusan Tujuan harus ekuivalen dengan Isu strategis, tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar.

2. Sasaran

Merupakan ukuran yang bisa menunjukkan pencapaian Tujuan Pembangunan, di dalam sasaran melekat Indikator Sasaran.

3. Indikator Sasaran (Impact)

Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil pencapaian outcome dengan kata kunci "*Apa yang ingin diubah*".

4. Program

Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan pada tahun

bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Kecamatan Kesamben sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

6. Indikator Kinerja Program (Outcome)

Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output dengan kata kunci **“Apa yang ingin dicapai”**.

7. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan produk/barang/jasa yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan input dengan kata kunci **“Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)”**.

8. Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)

Berisikan tentang anggaran awal tahun 2016 beserta target kinerja program dan pendanaan sebagai acuan atau pembanding 5 tahun kedepan.

9. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Merupakan perjanjian kepala OPD Kecamatan Kesamben dengan Bupati Blitar dalam Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik beserta kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program tersebut.

10. Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD (2021)

Menggambarkan hasil akhir yang harus dipenuhi kepala OPD.

11. Unit Kerja OPD Penanggung-jawab

12. Lokasi

Untuk itu kantor kecamatan Kesamben telah membuat program / kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Program perencanaan penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan,

- a. Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian kinerja
- b. Kegiatan Penyusunan dokumen Penganggaran dan laporan keuangan.
- c. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan

5. Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- a. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi desa/kelurahan
- b. Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan di Wilayah
- c. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kantrantibmas, Penegakan Peraturan Perundangan dan Kegiatan Sosial Budaya.
- d. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Monev Ekonomi sosial, budaya dan keagamaan

6. Program Pelayanan Kecamatan

- a. Kegiatan Fasilitasi dan Monev pelayanan publik di wilayah Kecamatan.
- b. Kegiatan Fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan.

Adapun rincian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 6.1.1 (terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Kesamben sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka rencana strategis Kecamatan Kesamben merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

Rencana strategis Kecamatan Kesamben akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 dan Misi ke-6 RPJMD Kabupaten Blitar 2016–2021 yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, pada tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, serta sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021 :

- (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- (2) Meningkatkan kemandirian desa

Dalam pencapaian kedua Sasaran tersebut, Kecamatan Kesamben mendorong pencapaian Indikator Kinerja Sasaran khususnya pada pencapaian Nilai SAKIP Kabupaten Blitar. Secara umum

Indikator Kinerja Daerah pada misi ke-4 dan misi ke-6 RPJMD adalah sebagai berikut pada table 7.1.1 (terlampir) :

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1.2 berikut(Terlampir) :

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) dari Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi aparatur Kecamatan Kesamben dalam pelaksanaan pembangunan sebagai unit kerja pelaksana wilayah di Kabupaten Blitar. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kesamben ini berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Blitar sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blitar. Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021.

Demikian Rencana Strategis Perubahan ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.

CAMAT KESAMBEN

Drs.PURWANTO,MM

NIP.19650927 199203 1 009

